

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rasyid, Et.al, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Ctk. Pertama Edisi Kedua, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Wakaf*, Ctk. Keempat, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Ctk. Keempat, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanannya di Indonesia*, Ctk Pertama, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2016.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 1987.
- DPPAI UII, *Menjadi Pemimpin Muslim Sejati (Materi Induk Latihan Kepemimpinan Islam Dasar)*, Ctk. Pertama, Edisi Revisi, Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI UII), Yogyakarta, 2013.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2012.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan : Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- M.A. Moegeni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (aansprakelijkheid) untuk Kerugian, disebabkan karena Perbuatan Melawan Hukum*. Pradnya Paramita, Jakarta, 1979.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

- _____, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Ctk. Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- _____, *Konsep Hukum Perdata*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- _____, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Ctk. Kedua, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Ctk Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, Ctk. Kedua, Edisi Kedua, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2015.
- Ridwan Khairandy, at. al., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Ctk. Pertama, Edisi Kedua, Gama Media, Yogyakarta, 2011.
- _____, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Ctk. Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- _____, *Hukum Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- _____, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Kedua, Revisi Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Ctk. Pertama, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Edisi Revisi, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia*, Ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, 2008.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang NO.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Edisi Baru, Ctk. Keempat, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010.
- Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, PT. Tatanusa, Jakarta, 2012.

Tatang M. Amirin, “*Kepemimpinan yang Amanah*”, *Dinamika Pendidikan*, Th.XIV/2007. terdapat dalam <http://eprints.uny.ac.id/4969/1/kepemimpinan-amanah.pdf>, 1 Febuari 2017 pukul 10.13 WIB.

Bambang Irawan, “*Konsep Perbuatan dan Tanggung Jawab Individu dalam Al-Qur'an*”, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol.8, 2012. terdapat dalam ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/lemlit/article/view/120/110, 1 Febuari 2017 pukul 10.15 WIB.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 198/Pid.B/2015/PN. Bdg.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Homologasi) 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Tinggi (Putusan Banding) No. 238/PID.SUS/2015/PT.BDG.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.

<http://digilib.uinsby.ac.id/8521/3/bab%203.pdf>, 1 Febuari 2017 pukul 10.21 WIB.

http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/perkara_detail.php?id=67112980-de9d-1e9d-96bf-31313332, 29 Oktober 2016 pukul 14.00 WIB.

<http://m.galamedianews.com/bandung-raja/5901/pertanyakan-hakkorban-koperasi-cipaganti-demo.html>, 30 Oktober 2016 pukul 21.41 WIB.

<http://nasional.kontan.co.id/news/banyak-aset-koperasi-cipanti-hilang-tanpa-bekas>, 29 Oktober 2016 pukul 22.13 WIB.

<http://nasional.kontan.co.id/news/koperasi-cipaganti-resmi-pailit>, 29 Oktober 2016 pukul 22.14 WIB.

<http://news.liputan6.com/read/2077851/kasus-penipuan-hakim-pengawas-didesak-investigasi-aset-cipaganti>, 31 Oktober 2016 pukul 8.58 WIB.

<http://www.ayopreneur.com/law/kreditur-minta-hakim-pengawas-investigasi-aset-koperasi-cipaganti>, 30 Oktober 2016 pukul 21.10 WIB.

